

BAB 6

PEMIKIRAN KEMBALI TENTANG KONSENSUS DALAM PLURALISME

BELAJAR DARI PENGELOLAAN HUTAN BERBASIS KOMUNITAS
DI YUNNAN, CINA

CAO GUANGXIA DAN ZHANG LIANMIN

PEMIKIRAN KEMBALI TENTANG KONSENSUS DALAM PLURALISME

BELAJAR DARI PENGELOLAAN HUTAN BERBASIS KOMUNITAS

DI YUNNAN, CINA

CAO GUANGXIA DAN ZHANG LIANMIN

Abstrak

Bab ini berkontribusi pada pemahaman tentang pluralisme dan pembelajaran sosial dalam pengelolaan hutan berbasis komunitas dengan menguji tiga kasus dari pengelolaan hutan desa di Yunnan, Cina. Para penulis mempertanyakan tren terkini dalam literatur untuk menghilangkan nilai konsensus dan mendukung konflik terbuka (FAO 1999, Rescher 1993). Sebuah analisis dari ketiga kasus menunjukkan bahwa nilai-nilai budaya mengenai konsensus juga penting dalam menghasilkan pembelajaran yang membawa pada strategi-strategi pengelolaan hutan yang berhasil. Analisis itu juga menunjukkan pentingnya komunikasi informal dan pentingnya pemimpin yang berpengaruh sebagai fasilitator dalam negosiasi yang berhasil dan kompromi untuk meraih konsensus dan oleh karenanya pertanyaan kami menekankan pada mekanisme formal dalam diskusi tentang pluralisme. Kami menunjukkan bahwa melalui negosiasi dan kompromi, bahkan komunitas yang memiliki kepentingan yang beragam dalam

sumberdaya hutan dapat secara efektif menyatukan sistem nilai budaya bersama dan mengembangkan mekanisme untuk mengelola kepentingan.

PENDAHULUAN

Dalam pembahasan mengenai pengelolaan hutan berbasis rakyat, literatur terkini mengenai pluralisme mempertahankan bahwa keragaman kepentingan di antara *stakeholder* menjadi sesuatu yang tidak dapat dihindarkan, baik pada tingkat material dan juga pada tingkat nilai budaya (FAO 1999, Rescher 1993). Oleh karena itu, beberapa penulis berpendapat, tidak ada pandangan tunggal tentang pengelolaan hutan dapat bersifat sebagai yang terbaik, dan konsensus menjadi sesuatu yang tidak bisa dicapai (Anderson *et al.* 1999, Daniels dan Walker 1999). Sering dibutuhkan sebuah proses untuk negosiasi formal dengan fasilitator luar yang netral atau berkuasa. Teori pembelajaran sosial (Lee 1993) juga menekankan pentingnya konflik terikat atau konflik yang dapat dikelola sebagai dasar utama untuk pembelajaran sosial dan pengelolaan adaptif. Sementara penekanan pada konflik terbuka dan konflik yang dianggap konstruktif mungkin bermanfaat dalam situasi pengelolaan, namun tampak tidak sesuai dengan konteks pengelolaan hutan berbasis desa di Cina sekarang ini, di mana pengembangan konsensus dianggap sebagai nilai budaya yang penting (Faure dan Rubin 1993).

Literatur tentang pluralisme dan pengelolaan hutan sangat menekankan pada proses-proses formal, seperti proses yang melibatkan peran fasilitator luar yang resmi dalam negosiasi *multistakeholder*. Meskipun komunikasi informal dibahas, sering tidak cukup memadai dalam menjelaskan hubungan *stakeholder*, dan demikian juga diskusi yang membahas bagaimana saluran-saluran informal bisa bekerja. Studi kami, dan juga studi lain di Cina, menemukan bahwa komunikasi informal sangat penting bagi masyarakat untuk datang bernegosiasi, berkompromi dan untuk mengidentifikasi strategi yang disepakati.

Dengan menggunakan studi kasus pengelolaan hutan komunitas di Propinsi Yunnan, Cina kami menunjukkan pertama bahwa

konteks budaya Cina menghendaki penekanan pada pengembangan konsensus awal, keseluruhan, yang sering didasarkan pada nilai-nilai budaya fundamental, sebelum kepentingan yang bertentangan dapat ditangani secara efektif. Kedua, kami menunjukkan bagaimana proses-proses informal negosiasi dan kompromi, yang difasilitasi oleh pengaruh pimpinan desa yang kuat, memiliki peran penting dalam proses pengembangan konsensus. Pengetahuan mendalam mengenai hubungan konsensus dan konflik, dan hubungan mekanisme negosiasi formal dan informal, memperjelas dinamika pengelolaan hutan komunitas dalam budaya lain di Asia dan sekitarnya.

KERANGKA KERJA KONSEPTUAL

Lee (1993), Korten (1984) dan Röling dan Jiggins (1998) menunjukkan bahwa pengelolaan adaptif kolaboratif melibatkan pembelajaran sosial. Aktor-aktor yang terlibat dalam pengelolaan hutan belajar bersama mengenai ekosistem dan mengenai inovasi dan rekonfigurasi kelembagaan yang mendukung pembelajaran yang efektif. Pendekatan pembelajaran ini membawa pada membaiknya pemahaman mengenai hubungan antara:

Status sumberdaya alam (hutan dan sumberdaya hutan)

Kelembagaan yang mengatur aktivitas manusia yang mempengaruhi status sumberdaya alam

Sistem pembelajaran (pengetahuan dan informasi) untuk memperbaiki kapasitas inovasi teknis untuk mengelola sumberdaya alam (Maarleveld dan Dangbégnon 1999).

Di sini kita akan mengkaji bagaimana pengelolaan berbagai kepentingan dalam pemanfaatan sumberdaya oleh komunitas di Yunnan menangani ketiga elemen di atas. Istilah 'kepentingan' di sini pada dasarnya merujuk pada kepentingan material dari anggota komunitas, meskipun beberapa kepentingan spiritual yang penting juga termasuk. Kami berasumsi bahwa dalam menangani kepentingan pengguna yang berbeda, komunitas memformulasikan konsensus yang pada prinsipnya dapat diterima oleh anggota komunitas. Rescher (1993: 13) yang merujuk pada Jürgen Habermas, mengacu hal ini sebagai konsensus rasional, yang

merupakan 'produk dari rakyat yang menjalankan norma-norma', yang akan dibedakan menurut konsensus *de facto*. Dalam proses koordinasi kepentingan mereka, rakyat lokal secara kontinu melembagakan nilai-nilai dan norma-norma dasar yang disepakati bersama melalui penegakan aturan komunitas yang dapat berfungsi sebagai dasar untuk menegosiasikan perselisihan di masa depan. Dengan demikian, konsensus dicapai melalui negosiasi aktif dan kompromi di antara anggota komunitas. Konflik dikelola secara diam-diam bukan secara terbuka. Kekuatan komunitas untuk bernegosiasi dengan *stakeholder* luar dalam pengelolaan adaptif pada gilirannya akan ditentukan oleh derajat konsensus yang dicapai di antara *stakeholder* dalam komunitas itu. Tujuan negosiasi dalam komunitas tersebut adalah untuk memfasilitasi pemahaman tentang kepentingan yang berbeda di antara para anggota. Anggota komunitas menjalankan proses negosiasi menurut nilai budaya di mana kesepakatan empat mata dan keharmonisan sangat penting. Kompromi timbul dari kebutuhan beberapa anggota untuk menyerahkan pemenuhan kepentingan individu mereka demi kepentingan dan nilai-nilai komunitas luas. Hal ini difasilitasi oleh pimpinan yang bekerja secara informal dengan kelompok individu atau kelompok kecil, yang mendorong pembangunan konsensus sebelum dibahas oleh publik secara terbuka.

LATAR BELAKANG DAN METODE

Propinsi Yunnan, yang terletak di bagian selatan-barat Cina pada 21°9'-19°15' dan 97°39'-106°12', memiliki total luas sebesar 390,000 km² yang 90%-nya adalah kawasan pegunungan (*lihat Gambar 6.1*). Propinsi tersebut memiliki penduduk sekitar 40,000,000 jiwa. Kawasan hutan di sepanjang Cina terdiri dari dua jenis: hutan negara dan hutan komunitas. Hutan komunitas berjumlah sekitar 61% dari total keseluruhan kawasan hutan. Berdasar hukum, setiap komunitas desa di Cina memiliki kawasan hutannya sendiri yang secara eksklusif untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Kebijakan mengenai hak guna dari lahan hutan desa ini dilaksanakan pada awal 1980-an dan menunjuk kawasan hutan untuk setiap rumah tangga tujuan pemanfaatan tertentu. Lahan hutan yang ditunjuk

digolongkan menjadi dua jenis: lahan hutan bebas (*Ziliushan*), yang dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga seperti kayu bakar dan pada dasarnya dikelola dan dimanfaatkan oleh rumahtangga individual dan lahan hutan kontrak (*Zerenshan*), di mana rumahtangga individu memiliki kewajiban untuk mengelola untuk seluruh desa. Dalam melaksanakan kebijakan ini, beberapa penyesuaian telah dibuat oleh komunitas lokal untuk memfasilitasi pengelolaan itu. Sebagai contoh, lahan hutan kontrak di banyak desa dikelola dan dimanfaatkan secara kolektif. Sehubungan dengan pemanfaatan hutan secara kolektif, volume ekstraksi kayu dikontrol oleh dan menjadi wewenang dari biro kehutanan kabupaten berdasar permintaan penduduk desa.

Untuk menggambarkan bagaimana komunitas lokal mengelola berbagai kepentingan mereka, kami mendokumentasikan pengalaman dari tiga desa tersebut. Dua desa dengan pengalaman yang berlawanan antara peng-

elolaan yang baik dan buruk dipilih berdasar komposisi etnik yang sama, saling berdekatan dan memiliki akses yang relatif baik terhadap transportasi dan pasar. Desa ketiga dipilih dalam kawasan yang relatif berada di pedalaman dengan kurangnya kontak langsung dengan otoritas dan akses yang rendah pada pasar. Kami bekerja bersama penduduk desa sebagai peneliti dan fasilitator selama lebih dari empat tahun dengan menggunakan penilaian desa partisipatif dan observasi partisipatif. Kepemimpinan desa pada tiap lokasi terdiri dari komite yang terdiri dari satu kepala desa, satu wakil kepala desa, satu akuntan dan satu pimpinan perempuan. Tabel 6.1 menyajikan informasi tambahan mengenai konteks pengelolaan hutan pada tiap desa tersebut (Cao dan Zhang, 1997).



Gambar 6.1. Lokasi tiga desa di Propinsi Yunnan, China: 1, Desa Dongda; 2, Desa Beida dan 3, Desa Tangdui

Tabel 6.1. Lokasi, populasi, dan informasi hutan untuk ketiga desa studi kasus di Propinsi Yunnan

Nama Desa	Lokasi dan Populasi	Kondisi dan Kepemilikan hutan
Beida	Dekat ibukota propinsi (20 km); Populasi: 210 Suku mayoritas: Han	Luas hutan: 2000 mu*, tidak ada pohon besar; spesies utama: Pinus yunnanensis, P. armandi Kepemilikan: kolektif, tetapi dengan kontrak dan lahan bebas yang ditunjuk untuk rumah tangga individu
Dongda	Dekat ibukota propinsi (20 km); Populasi: 225 Suku mayoritas: Han	Luas hutan: 3000 mu; ada pohon besar Spesies utama: P. yunnanensis, P. armandi Kepemilikan: kolektif
Tangdui	Yunnan Utara-Barat, kota terdekat berjarak 30 km Populasi: 752 Suku mayoritas: Tibet	Luas hutan: 30,000mu; ada pohon besar Spesies utama: P. densata, P. armandi, Picea sp, Arbies sp Kepemilikan: kolektif

*15 mu = 1 hektar

STUDI KASUS

Beida

Desa Beida terdiri dari beragam kelompok, yang meliputi petani, peternak, pemilik kebun buah-buahan, sayuran, dan pemilik bisnis kecil lain. Desa tersebut mengalami penurunan dalam luasan hutannya hingga saat ini. Di awal tahun 1960-an, karena alasan politik yang mempengaruhi sebagian besar Cina saat itu, produksi pertanian banyak yang gagal dan sangat mempengaruhi matapencaharian dasar penduduk desa. Meskipun komunitas ingin melestarikan hutannya untuk pemanfaatan masa depan dan merumuskan kebijakan serta menugaskan seorang penjaga untuk melakukan ini, hutan itu tetap saja tidak lestari. Karena kurangnya ukuran-ukuran efektif untuk berhubungan dengan kelangkaan pangan, para penduduk desa terpaksa menebang pohon mereka untuk mereka tukar dengan makanan. Karena kondisi yang sangat buruk dan kurangnya alternatif pangan, penjagaan hutan desa itu tidak mencegah penebangan liar.

Tidak puas dengan masalah deforestasi yang mereka buat sendiri, penduduk desa mengganti pemimpin mereka. Tetapi deforestasi

terus berlangsung, sehingga mereka mengganti pemimpinnya lagi. Pola ini diulangi lagi dan lagi hingga setiap orang laki-laki dewasa sudah menjadi kepala desa. Dengan hilangnya sebagian besar kawasan hutan, hutan tersebut ditinggalkan beregenerasi secara alami. Regenerasi ini terancam lagi pada awal 1980-an, ketika kebijakan kehutanan yang baru dilaksanakan untuk mendorong pengontrolan individu pada kawasan hutan. Penduduk desa bertemu pada saat itu. Tanpa banyak diskusi sebelum pertemuan desa, penduduk desa biasanya menyuarakan dukungan untuk kontrol individu atas kawasan hutan dalam pertemuan tersebut. Namun, tidak ada mekanisme kontrol yang efektif pada tingkat penduduk yang berhasil. Deforestasi lebih lanjut terjadi menyusul alokasi lahan hutan. Kepemilikan individu bisa jadi berkontribusi pada deforestasi, namun kami menunjukkan pengembangan konsensus yang lemah dan proses pembelajaran yang buruk dapat juga berkontribusi pada hal tersebut.

Meskipun terjadi deforestasi, beberapa hektar hutan di hutan daerah aliran sungai secara relatif dapat dilestarikan, meskipun tidak ada pohon besar. Penduduk desa menghubungkan kesuksesan ini dengan pentingnya kawasan untuk sumberdaya air mereka, dan juga karena lokasinya yang dekat dengan pemukiman mereka.

Pelajaran utama yang diambil dari kasus ini dapat diringkas sebagai berikut:

- Kebutuhan dan kepentingan penduduk desa tidak dikoordinasikan dengan baik untuk pemeliharaan kawasan hutan yang baik, meskipun penduduk desa memiliki kepentingan yang jelas dalam mengelola hutan mereka dengan baik.
- Tidak ada pembelajaran sosial yang efektif yang terjadi. Adaptasi tidak disalurkan ke dalam pembelajaran sosial, namun malah dengan pergantian kepemimpinan.
- Aliran informasi bersifat acak, karenanya pembelajaran sosial tidak terkoordinasi dengan baik.
- Sebaliknya, dalam kasus berikut ini tentang pengelolaan yang baik, kendala-kendala tersebut dapat diatasi.

Dongda

Desa Dongda masih memiliki sedikit hutan tanaman tua yang didirikan pada tahun 1947 selama masa Guomintang. Selama 50 tahun lalu, Dongda telah mengalami pertumbuhan yang stabil dalam hutan tutupannya dengan lebih dari separoh kawasan hutan direforestasi. Pada masa lalu, hampir semua penduduk desa tergantung pada berbagai aspek pertanian untuk kehidupan mereka, seperti peternakan, tanaman pangan dan perkebunan, penyembuhan penyakit, kerajinan dan lainnya (Gambar 6.2). Begitu ekonomi berkembang, berkembang juga kepentingan ekonomi di antara penduduk desa tersebut. Sebagai contoh, sebagian besar para petani sekarang menanam berbagai jenis sayur. Beberapa petani sibuk dengan jamur dan kegiatan pengumpulan *Myrica* sp untuk keperluan uang tunai, sementara yang lain sibuk dalam bisnis non-pertanian. Beberapa orang sangat mengandalkan sumberdaya hutan untuk



Gambar 6.2 Hutan desa memenuhi berbagai kebutuhan penduduk desa. Kuda seorang petani sedang merumput di hutan Dongda

matapencarian mereka. Perbedaan ini tidak mempengaruhi pengelolaan hutan, namun telah menunjukkan kenyataan bahwa sumberdaya hutan tidak lagi menjadi sumberdaya ekonomi bagi desa secara keseluruhan.

Semua penduduk desa menyetujui bahwa hutan memberi mereka dengan berbagai hasil dan memberikan udara bersih bagi mereka. Air minum mereka berasal dari sebuah bukit yang ditutup dengan tutupan hutan yang rapat. Jika ditanya tentang dasar pemikiran untuk melestarikan hutan, seorang penduduk desa menjawab:

"Kawasan hutan lebih baik daripada lahan yang gundul, karena lahan yang gundul menimbulkan perasaan buruk dan monoton dalam hati seseorang. Untuk memiliki hutan di dekat kita berarti bahwa

fengshui dari lokasi itu (yang berarti keharmonisan dalam lingkungan hidup, yang secara mistis mempengaruhi lokasi pada nasib seseorang dan keberuntungan generasi masa depan – cara berpikir masyarakat Cina) akan bagus dan akan menimbulkan kehidupan yang baik...."

Pada tahun 1960-an, pemimpin desa mengembangkan strategi untuk memenuhi berbagai kebutuhan penduduk desa, melalui pengayaan hutan dengan bambu yang tumbuh cepat. Hutan ini tidak diizinkan untuk ditebang secara individu guna dijual, melainkan secara kolektif.

Pada masa selanjutnya, dari 1981 hingga 1989, kepala desa Dongda memimpin komunitas dalam masa-masa kritis dari perubahan dalam kebijakan hutan nasional. Dia bilang:

"Kebijakan hutan nasional tidak lengkap dan dengan demikian dapat dengan mudah diberlakukan dengan menyesuaikan kebutuhan kita....kita menyesuaikan kebijakan umum itu dengan kondisi desa dan membuatnya efektif. Prinsipnya adalah bahwa kita menggunakan isi rasional dalam kebijakan tersebut untuk memfasilitasi pengelolaan hutan lokal. Sebagai contoh, kebijakan kehutanan tahun 1980-an mengatur bahwa hutan kolektif harus dibagi menjadi dua bagian sebelum diberikan kepada rumahtangga, yaitu 'bukit kontrak', Zerenshan, dan 'bukit bebas', Ziliushan. Dengan mempertimbangkan bahwa kondisi hutan kami bagus dan rumahtangga petani tidak memiliki cukup uang untuk membeli 'bukit bebas', kami memutuskan untuk mengalokasikan hanya bukit kontrak pada petani dan memperlakukan peraturan yang sesuai untuk memonitor kegiatan pengelolaan berdasar diskusi informal dengan beberapa penduduk desa. Jika hal ini diumumkan dalam pertemuan desa, sebagian besar penduduk akan mendukung pilihan ini dan tidak ada yang menentang secara terbuka. Rencana ini kemudian disampaikan kepada departemen kehutanan lokal, yang kemudian mendukungnya".

Kepala desa itu menambahkan 'Jika anda ingin melestarikan hutan juga, kata kunci dalam pengelolaannya adalah "berani", yaitu anda berani untuk mencegah pelanggar dan potensi pelanggar. Jika anda takut berposisi dan mencoba untuk baik kepada semua orang,

jangan pernah bicara tentang pengelolaan hutan.' Namun, dia juga mengatakan, 'Berani dalam pengelolaan hutan tidak bisa berfungsi dengan sendirinya tanpa pertukaran ide dan pendapat dan bicara mengenai masalah-masalah itu. Seseorang perlu bicara dengan orang lain yang melakukan kesalahan dan memberitahu dia untuk menyadari perlunya keputusan itu.' Oleh karena itu, sementara dia-kui ada konflik, cara menyelesaikannya menunjukkan penekanan budaya pada konsensus, dalam arti bahwa seorang pelanggar diharapkan bisa melihat situasi dari sudut pandang kelompok yang lebih besar.

Pertemuan desa merupakan sarana di mana banyak diskusi berlangsung. Pertemuan-pertemuan ini memungkinkan hampir seluruh penduduk desa untuk terlibat dalam pembuatan keputusan mengenai masa depan mereka. Pimpinan desa sangat mengetahui pentingnya pertemuan-pertemuan ini. Jika ada aksi kehutanan yang baru dimulai, ide-ide dan pendapat komunitas akan ditampung dalam pertemuan ini dan tanggungjawab dibagi di antara anggota. Proses sebelum pertemuan desa ini juga penting. Sebelum pertemuanlah konsensus akan dinegosiasikan secara informal. Sebagaimana dikatakan oleh kepala desa, dia sering menyampaikan pesan-pesan melalui kawasan dan keluarga mengenai pengelolaan di masa depan untuk menguji umpan-balik dari penduduk desa. Gosip dan pendapat yang berbeda sering menunjukkan bahwa sebuah rencana baru tidak layak dan memerlukan penyesuaian-penyesuaian. Menurut kepala desa, pengelolaan yang baik tidak saja tergantung pada pemberian hukuman pada setiap pelanggar, namun pada pengendalian perilaku yang salah sebelumnya. Cara yang paling efisien untuk mencapai hal ini adalah dengan membahas dan mempublikasikan peraturan yang baru dalam pertemuan desa itu.

Pelajaran yang diambil dari kasus Dongda adalah:

Koordinasi kepentingan melalui pemimpin yang efektif pada sistem nilai bersama menghasilkan pengelolaan hutan yang baik, meskipun beberapa penduduk desa tidak tergantung pada sumberdaya hutan untuk matapencaharian mereka.

Untuk mencapai konsensus keseluruhan dalam masyarakat tidak berarti tidak ada konflik. Namun, penduduk desa mencoba

mengurangi konflik dan membawa sebanyak mungkin masyarakat pada konsensus

Pembelajaran terjadi melalui pimpinan yang efektif yang terlibat dalam pertukaran informasi secara aktif.

Tangdui

Matapencaharian di desa Tangdui sangat beragam, yang meliputi pertanian, pengumpul jamur, pemilik peternakan, pembuat guci, pengusaha transportasi, retailer dan pengrajin. Hutan memiliki peran penting dalam mendukung kebutuhan hidup sehari-hari, yang memberikan sumber seperti kayu bakar dan kayu. Komite desa Tangdui terdiri dari orang-orang yang sangat berpengalaman. Menurut budaya lokal, para sesepuh harus dihormati. Komunikasi dan pengambilan keputusan terjadi melalui sarana formal dan informal. Sebagai contoh, pembuat guci pernah mengusulkan perluasan bisnisnya, yang membutuhkan lebih banyak konsumsi kayu bakar, namun juga memberikan kesempatan tenaga kerja. Mereka menyampaikan usulan mereka pertama melalui saluran informal dan akhirnya pada pimpinan desa, hingga akhirnya bisa diterima oleh keseluruhan penduduk desa.

Kehidupan spiritual penduduk desa yang berasal dari Tibet sangat berhubungan dengan sumberdaya hutan di sekitarnya (Gambar 6.3). Menurut ajaran Buddha, manusia harus berperilaku dengan cara sedemikian rupa tidak melanggar hukum alam. Pada desa ini, dua bukit yang berseberangan di pegunungan sekitarnya merupakan bukit keramat mereka, di mana tidak diijinkan untuk menebang pohon dan kondisi hutannya memang lebih baik daripada tempat lain.

Setiap pagi, setiap keluarga membakar cabang dan daun *Pinus densata* sebagai dupa untuk sembahyang. Desa tersebut telah membuat aturan untuk mengelola spesies pinus, dan aturan-aturan ini secara sukarela diikuti oleh penduduk desa itu. Keyakinan agama dan pemanfaatan daun-daun hutan menjadi alasan utama bagi kepedulian desa itu terhadap hutan. Pada pertemuan desa, sistem nilai bersama ini sering dirujuk sebagai alasan untuk pengelolaan hutan yang lebih baik.

Penduduk desa di Tangdui memanen kayunya melalui tebang pilih untuk pohon spruce dan fir yang terletak agak jauh. Para sesepuh dan tokoh-tokoh lain membahas pilihan-pilihan pengelolaan secara informal di antara mereka sendiri dan kemudian memformulasikan aturan untuk rotasi penebangan. Aturan ini secara terus-menerus diumumkan dalam pertemuan-pertemuan desa. Pidato kepala desa menyatakan, sangat penting untuk terus-menerus mengingatkan penduduk desa akan peraturan itu untuk menghindari pelanggaran. Dia mengatakan bahwa sejauh ini setiap orang

mematuhi peraturan itu dengan sukarela.

Rakyat lokal juga mengorganisir diri mereka sendiri secara kolektif untuk melindungi hak eksklusif mereka untuk mengumpulkan jamur yang bernilai – *matsutake*. Gerakan ini diawali oleh para pengumpul jamur dan dikomunikasikan pada kelompok lain di desa



Gambar 6.3 Persembahyangan lokal pada bukit keramat di desa Tangdui

itu untuk mendapatkan persetujuan mereka. Akhirnya konsensus diumumkan dalam pertemuan desa; orang luar tidak diijinkan memasuki hutan desa secara bebas untuk mengumpulkan jamur itu; namun ada iuran masuk yang akan dibebankan pada orang luar ini.

Antara tahun 1996 dan 1998, diluncurkan proyek perhutanan sosial oleh pemerintah. Penduduk desa lokal meyakinkan departemen kehutanan untuk membantu mereka dalam membangun sistem irigasi (SFET [*Tim Evaluasi Social Forestry*] dalam berita). Mereka juga bernegosiasi dengan departemen kehutanan lokal untuk pengaturan pengembalaan yang terkontrol, di mana hewan dapat digembalakan di hutan yang tertutup. Pengelolaan proyek yang berhasil ini dengan pihak luar, seperti departemen kehutanan menunjukkan pentingnya konsensus internal dalam memperkuat posisi tawar negosiasi desa tersebut.

Pelajaran dari kasus ini adalah:

- Nilai-nilai budaya bersama mengenai sumberdaya hutan memberikan penduduk desa dengan insentif bersama dalam melindungi hutan tersebut
- Proses komunikasi lokal difasilitasi oleh kelompok sesepuh lokal
- Adopsi yang efektif sangat dimungkinkan melalui koordinasi kepentingan internal dari komunitas dan aliran informasi yang efektif melalui saluran informal.

ANALISIS

Negosiasi dan Kompromi

Pentingnya negosiasi dan kompromi informal jelas digambarkan dalam semua kasus tersebut. Di Dongda dan Tangdui, nilai-nilai bersama menciptakan dasar yang kuat untuk negosiasi dan kompromi yang berhasil, yang membawa pada pengelolaan hutan secara lebih efektif. Beida menggambarkan bahwa nilai-nilai bersama itu sendiri tidak cukup. Tanpa kepemimpinan yang efektif dalam proses-proses informal untuk membangun konsensus, upaya-upaya pengelolaan hutan bisa jadi gagal.

Meskipun kebutuhan spiritual berkontribusi pada sistem nilai bersama di Tangdui, anggota komunitas sangat peduli dengan kebutuhan matapencaharian pentingnya, misalnya, kepentingan materi mereka, yang harusnya berfungsi sebagai dasar negosiasi selanjutnya. Kasus Beida menunjukkan bahwa, karena komunitas tidak mampu secara efektif menangani kebutuhan dasarnya tanpa memanfaatkan hutan mereka, ide-ide mereka untuk pengelolaan hutan tidak dapat dilembagakan, dan pada kenyataannya bahkan akan diabaikan oleh penduduk desa. Di lain pihak, di desa Dongda dan Tangdui, penanganan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar menghasilkan pengelolaan hutan yang efektif. Analisis ini menunjukkan bahwa negosiasi internal yang efektif harus dimulai saat ada krisis-krisis tertentu seperti kelangkaan pangan atau perubahan kebijakan.

Manfaat pengembangan konsensus, dengan dasar pada komunikasi informal dan diorganisir oleh pemimpin yang kuat, jelas

diterima oleh komunitas lokal di dua desa yang berhasil tersebut. Bahkan dalam kasus Beida, komunitas ingin melembagakan proses yang lebih baik, sebagaimana terlihat dalam upaya mereka dengan mengganti kepemimpinan. Kasus-kasus ini menunjukkan bahwa pengelolaan hutan yang berhasil akan mensyaratkan adanya pembelajaran sosial, pimpinan yang efektif dan komunikasi informal.

Pembelajaran sosial

Konflik dan konsensus merupakan sebab dan akibat dari pembelajaran sosial, yang memfasilitasi proses-prosesnya. Baik konflik atau konsensus jika mendominasi secara terus-menerus, pembelajaran sosial yang efektif kemungkinan kecil bisa terjadi. Konflik yang terjadi di Desa Beida, pengelolaan adaptif dihambat oleh rendahnya pembelajaran sosial. Untuk pengelolaan yang efektif, konflik harus diselesaikan dan paling tidak untuk sementara konsensus bisa dibangun sebagai dasar dari pengelolaan (Lee 1993). Karena kondisi berubah, konsensus yang lama bisa tak berlaku karena konflik baru, yang membentuk konsensus selanjutnya dengan proses yang berulang. Kasus Dongda dan Tangdui menunjukkan bahwa pembentukan konsensus yang berulang ini atas konflik yang terjadi dapat menghasilkan pembelajaran sosial yang efektif mengenai masalah-masalah pengelolaan hutan.

Perbedaan konteks budaya dan politik menunjukkan perbedaan keseimbangan antara konflik dan konsensus. Dalam konteks seperti demokrasi Barat, misalnya, di mana masyarakat menghargai kebebasan individu dan kompetisi politik sebagai hak asasi mendasar, konflik dapat dipandang sebagai alat yang menonjol dan penting untuk pembelajaran sosial (Lee 1993). Penganut pandangan ini mengakui bahwa ketidaksepakatan harus dikontrol, meskipun tidak ada batas yang jelas darimana konsensus itu diberikan (Rescher 1993). Di lain pihak, dalam budaya seperti di Cina, di mana rakyat menempatkan solidaritas kelompok pada tempat tertinggi dan di mana debat terbuka dan ketidaksepakatan yang penting dianggap sebagai situasi yang tidak nyaman yang harus dihindari, konsensus memainkan peran yang relatif penting dalam memfasilitasi pembelajaran sosial. Pentingnya konsensus ini jelas ditunjukkan dari ketiga

kasus di atas, di mana rakyat lokal berupaya mengelola kepentingan desanya tanpa mengganggu potensi kerja sama di masa depan antara satu dengan yang lainnya. Bahkan di desa Beida, kita masih dapat melihat kebutuhan rakyat lokal untuk mengidentifikasi cara yang efektif dalam pembelajaran sosial dengan sedikit konflik terbuka dengan memilih pimpinan yang berbeda.

Kepemimpinan

Untuk membuat pembelajaran sosial dalam pengelolaan hutan menjadi mungkin, kasus-kasus itu menyarankan perlunya memiliki pimpinan yang baik yang bertindak sebagai fasilitator internal. Pemimpin yang baik harusnya mampu mengkoordinasikan proses pembelajaran sosial dan menggunakannya sebagai saluran untuk mencapai pilihan pengelolaan yang dapat diterima. Jenis kepemimpinan ini dapat meliputi upaya-upaya untuk meyakinkan penduduk desa akan pandangan-pandangan baru dan menentang mereka yang mencoba memaksakan kepentingan mereka, semua demi kepentingan untuk mencapai konsensus akhir. Contoh dari jenis kepemimpinan ini terlihat dalam kasus Dongda yang mengatasi perubahan dalam kebijakan kehutanan pada tahun 1980-an dan manipulasi desa Tangdui terhadap proyek sosial *forestry* dari luar. Di desa Beida, tak satupun terlihat mampu melakukan peran untuk mengkoordinasi pembelajaran dan akibatnya, pengelolaan hutan menjadi gagal.

Komunikasi dan Aliran Informasi

Komunikasi yang baik di dalam kelompok memfasilitasi pembelajaran sosial yang efektif. Dalam studi kasus ini, komunikasi lokal terjadi sebagian besar melalui sarana-sarana informal. Obrolan harian saat kunjungan antar teman dan keluarga meningkatkan aliran informasi yang cepat. Efektivitas dan keinginan akan komunikasi informal digambarkan dalam kasus Dongda, di mana kepala desa segan untuk melembagakan rencana pengelolaan yang baru sebelum menerima *input* melalui saluran informal. Aliran informasi informal ini juga digunakan oleh pimpinan lokal untuk memberitahu komunitas yang lain untuk melaksanakan keputusan-keputusan, dan untuk mengakomodasi kepentingan tertentu (seperti pengumpul

jamur di Tangdui dan pembuat guci).

Kekuatan komunikasi informal terletak pada dua prinsip: kondisi dan keterbukaan budaya Cina. Di Cina pedalaman, rakyat lokal menghindari pandangan-pandangan yang berlawanan secara terbuka dan menganggap pandangan tersebut sebagai ancaman pada hubungan pribadi mereka dan upaya untuk membangun modal sosial. Oleh karena itu, saluran informasi yang lebih informal dan kasual lebih disukai untuk bertukar ide-ide yang tidak sama. Keterbukaan saluran informal memungkinkan pertukaran yang lebih demokratis dan pembobotan yang sama pada ide-ide baru. Pimpinan dan fasilitator yang baik harus mampu memahami dan menggunakan saluran informasi informal untuk menguji dan mengkomunikasikan keputusan-keputusan utama dalam hal penggunaan sumberdaya. Dokumentasi lain di Cina juga menunjukkan adanya penggunaan saluran-saluran informal untuk menegosiasikan kepentingan (Xu *et al.* 1998)

KESIMPULAN

Kasus dalam studi ini menunjukkan bahwa melalui koordinasi kepentingan yang beragam, komunitas lokal mampu mengelola sumberdaya hutan secara efektif. Pengelolaan hutan akan membaik jika pimpinan yang responsif dan efektif memfasilitasi pembelajaran sosial dengan menggunakan proses komunikasi informal. Berdasarkan sekumpulan nilai-nilai budaya mengenai keinginan adanya kesepakatan, khususnya dalam keadaan informal atau di depan publik, pembelajaran ini membawa pada pengembangan konsensus yang efektif. Sebuah analisis dari proses ini menunjukkan adanya revisi teori pluralisme dalam hal pandangannya mengenai peran konflik dan konsensus dan sarana untuk mencapai konsensus. Kami menyarankan untuk melihat konflik dan konsensus sebagai pasangan yang saling berkaitan, di mana keseimbangan akan berubah menurut konteks budaya yang berlaku; tak satupun lebih penting dan keduanya dapat berkontribusi pada pembelajaran sosial. Memahami perbedaan budaya tentang bagaimana kelompok sosial akan mengelola konflik dan menghargai konsensus akan menyebabkan adanya pemahaman yang lebih lengkap mengenai bagaimana pembelajaran

sosial dapat dicapai. Mengelola konflik dengan demikian akan membutuhkan keadaan di luar meja negosiasi formal, dan kondisi ini akan menghendaki keahlian tertentu dan jenis orang tertentu untuk mengelolanya. Harus lebih memperhatikan pentingnya proses-proses lain, seperti peran pimpinan lokal dalam membangun konsensus sebelum pengambilan keputusan secara formal. Karena konsep pembelajaran sosial diterapkan di berbagai keadaan, kita dapat berharap untuk melihat lebih banyak modifikasi yang berhubungan dengan nilai-nilai dan proses-proses informal dari konsep tersebut dan asumsi yang mendasari penggunaannya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kerja lapangan untuk studi ini disponsori oleh Program Hutan, Pohon dan Masyarakat FAO dan Program Pendidikan Russel Train WWF. Kami ingin mengucapkan banyak terima kasih pada petani lokal untuk kesabaran dan kerja sama mereka. Penulisan makalah ini dibuat mungkin oleh lokakarya yang sangat terstruktur baik dan informatif di East West Center, khususnya pada penyelenggara dan fasilitator. Partisipasi penulis dibuat mungkin dengan dukungan kerja administrasi yang efisien dari June Kuramoto dan Mary Abo. Juga untuk Sonja Brodt atas kesabaran dan instruksi mendetail untuk membantu memfokuskan dan menstrukturkan tulisan ini, dan kepada David Edmunds untuk diskusi dan *input*-nya dalam memfokuskan kembali tulisan ini. Berikut ini adalah orang-orang yang telah memberikan bantuan dan komentar selama persiapan tulisan ini: Jeff Fox, Louise Buck, Glenn Dolcemascolo, Wenpin Lin, Christian Asanga, Bishnu Upreti dan Ron Ayling.

BAHAN RUJUKAN

Anderson, J., Clemant, J. and Crowder, L. V. 1999. "Pluralism in sustainable forestry and rural development: an overview of concepts, approaches and future steps." *In*: Food and Agriculture Organization (FAO). Pluralism and Sustainable Forestry and Rural

Development. *Proceedings of the fourth biennial conference on communication and environment*, 28 July 1997, 17-26. Cazenovia, New York. Food and Agriculture Organization, Rome.

Cao, G. and Zhang, L. 1997. "Innovative forest management by the local community in Dongda village, Yunnan Province." *Forests, Trees and People Newsletter* 34:32-38.

Daniels, S. E. and Walker, G.B. 1999. "Rethinking public participation in natural resources management: concept from pluralism and five emerging approaches." *In: Pluralism and Sustainable forestry and Rural Development. Proceedings of the fourth biennial conference on communication and environment*, 28 July 1997, 29-48. Cazenovia, New York. Food and Agriculture Organization, Rome.

Food and Agriculture Organization (FAO) 1999. "Pluralism and Sustainable forestry and Rural Development." *Proceedings of the fourth biennial conference on communication and environment*, 28 July 1997. Cazenovia, New York. Food and Agriculture Organization, Rome.

Faure, G.O. and Rubin, J. Z. (eds.) 1993. *Culture and Negotiation: the resolution of water disputes*. Sage Publications, Newbury Park.

Korten, D.C. 1984. "Rural development programming: the learning process approach." *In: Korten, D.C. and Klaus, R. (eds.) People-centered development: contributions toward theory and planning frameworks*, 176-188. Kumarian Press, West Hartford, Connecticut, USA.

Lee, K. N. 1993. *Compass and Gyroscope: integrated science and politics for the environment*. Island Press, Washington, D.C.

Rescher, N. 1993. *Pluralism: against the demand for consensus*. Clarendon Press, Oxford.

Röling, N. G. and Jiggins, J. 1998. "The ecological knowledge system." *In: Röling, N. G. and Wagemakers, M. A. E. (eds.) Facilitating Sustainable Agriculture: participatory learning and adaptive management in times of environmental uncertainty*, 283-311. Cambridge University Press, Cambridge, UK.

Maarleveld, M. and Dangbégnon, C. 1999. "Managing natural resources: A social learning perspective." *Agriculture and Human Values* 16 (3). Pp.267-280.

Social Forestry Evaluation Team (SFET) 1998. "Evaluation Report on Rational Utilization of Forest Land Trail and Pilot Project in Yunnan Province." Evaluation Group of Rational Utilization of Forest Land Trail and Pilot Project in Yunnan Province.

Xu G., Cao, G., He, P., Li, W.J.Y., Lin, Xie. 1998. *Community Forestry*. Chinese Forestry Press.

